

**ANALISIS PENGARUH INDEKS HARGA KONSUMEN, PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO, PENANAMAN MODAL ASING,
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, DAN TINGKAT PARTISIPASI
ANGKATAN KERJA TERHADAP UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DI
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2000-2022”**

JURNAL



Oleh:

Nama : Selvy Durrotul Majdina

NIM : 20313415

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2024

ANALISIS PENGARUH INDEKS HARGA KONSUMEN, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, PENANAMAN MODAL ASING, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2000-2022”

SELVY DURROTUL MAJDINA

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,

Universitas Islam Indonesia

selvymajdina27@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Indeks Harga Konsumen (IHK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2000-2022. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta surat kabar elektronik yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu *Error Correction Model* (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Indeks Harga Konsumen (IHK) berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta pada estimasi penelitian secara jangka panjang, akan tetapi tidak berpengaruh secara estimasi penelitian secara jangka pendek. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta pada estimasi penelitian secara jangka panjang, akan tetapi tidak berpengaruh secara estimasi penelitian secara jangka pendek. Variabel Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta pada estimasi penelitian secara jangka panjang, akan tetapi tidak berpengaruh secara estimasi penelitian secara jangka pendek.. Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta pada estimasi penelitian secara jangka panjang dan jangka pendek. Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta pada estimasi penelitian secara jangka panjang, akan tetapi tidak berpengaruh secara estimasi penelitian secara jangka pendek.

Kata Kunci : Indeks Harga Konsumen (IHK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Upah Minimum Provinsi (UMP), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Error Correction Model (ECM)

PENDAHULUAN

Upah ialah imbalan yang diterima pekerja karena pemberian jasa kerja pada proses produksi jasa atau barang pada perusahaan. Pekerja, pemerintah serta perusahaan mempunyai perbedaan kepentingan atas upah. Pekerja mempunyai kepentingan atas upah guna pemenuhan keperluan hidupnya, kemudian perusahaan berupaya melaksanakan efisiensi biaya supaya bisa mengoptimalkan profit. Perbedaan kepentingan diantara pekerja terhadap perusahaan terkait upah memberikan sebab terdapatnya masalah diantara pekerja dan perusahaan terkait upah yang seharusnya didapat. Pemerintah sebagai pihak yang menentukan kebijakan pengupahan diinginkan bisa memberi keadilan untuk tenaga kerja beserta perusahaan ketika menentukan upah. Maksud pemerintah menentukan kebijakan pengupahan ialah guna tetap bisa memberikan jaminan atas standar kehidupan layak untuk pekerja beserta keluarganya, menaikkan daya beli masyarakat beserta menaikkan produktivitas.

Pemerintah menetapkan peraturan yaitu PP RI No. 36 Tahun 2021 mengenai pengupahan. Dalam PP ini terdapat salah satu pasal yang membahas tentang kebijakan pengupahan, yaitu Pasal 5 dalam Bab II mengenai Kebijakan Pengupahan. Dalam pasal ini berbunyi (1) Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dilandaskan atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Ketidakadilan untuk pekerja pada praktek KHL masih banyak terjadi. Karenanya KHL dirasa kurang bila dipakai sebagai menentukan nilai UMP, hingga diperlukan memakai faktor lain yakni IHK (Indeks Harga Konsumen). Indeks harga yaitu rerata berdasarkan harga produk didasarkan atas uang berlaku di pasar, yang bisa diberi arti sebagai ukuran tingkat harga rerata jasa beserta barang indeks. Maka, pengertian Indeks Harga Konsumen yakni indeks harga yang memberikan ukuran terhadap biaya sekelompok jasa dan barang di pasar. Dengan memakai IHK, maka pemerintah bisa

melihat harga-harga sekarang, hingga tingkat upah bisa diselaraskan atas harga yang sedang terjadi.

Penentuan jumlah UMP berpedoman terhadap nilai tambah yang diperoleh pekerja. Teori upah efisiensi menjabarkan melalui penetapan upah minimum kemungkinan pekerja menaikkan nutrisi berjangka panjang sehingga dapat menaikkan produktivitas. Berdasarkan teori tersebut upah dibayar melampaui dari upah keseimbangan, hingga menyebabkan produktivitas pekerja beserta total yang diproduksi pun akan naik. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu sebutan total tingkat output diproduksi. PDRB merupakan faktor yang memberi pengaruh nilai tambah jasa beserta barang berdasarkan hasil dari segala macam bentuk unit produksi ataupun sektor pada daerah berjangka. Maka, PDRB yang digunakan untuk mengenali indikator pembangunan disebut PDRB per kapita. PDRB per kapita ini menjadikan bagaimana seharusnya merata pendapatan di setiap daerah, sehingga ketimpangan pendapatan menjadi sedikit.

Investasi juga merupakan poin penting dalam keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah. Investasi berarti menanamkan modal pada pembelian barang sebagai modal dan fasilitas produksi agar dapat memberikan tambahan kemampuan suatu unit menghasilkan jasa maupun barang (Fadillah & Anis, 2020). Investasi terbagi atas dua yakni Penanaman Modal Asing (PMA) beserta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing dengan menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Jika investasi di suatu daerah berkomitmen untuk menjadi salah satu bentuk bantuan kepada daerah tersebut, maka bisa dipastikan perekonomian daerah tersebut membaik ke depannya, sehingga berpengaruh pada tingkat upah yang meningkat pula

Selain menggunakan investasi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga dipakai ketika menentukan UMP. TPAK ialah sebuah indikator ketenagakerjaan yang memberi deskripsi terkait penduduk yang aktif secara ekonomi untuk aktivitas keseharian berpedoman terhadap sebuah waktu pada periode tertentu. TPAK dipakai guna melihat penawaran tenaga kerja. Setelah melihat seberapa besar penawaran tenaga kerja, kemudian upah bisa ditentukan dengan layak. Upah menjadi topik krusial pada sektor ketenagakerjaan diakibatkan kondisi pasar tenaga kerja yang dualistik, hal tersebut ditandai dengan melimpahnya tenaga kerja serta rendahnya kualitas angkatan kerja. Meskipun upah minimum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan di setiap tahunnya, akan tetapi sebenarnya cenderung tidak mencukupi kebutuhan pekerja, dapat membuat masyarakat semakin jauh dari akses pemenuhan kesejahteraan, baik dari segi fisik, non fisik, dan sosial

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian oleh Bersales & Lucagbo (2014) yang berjudul “Determinants of Regional Minimum Wages in the Philippines”. Penelitian menggunakan estimasi dua tahap kuadrat pada data panel periode 1990-2012. Penelitian memperlihatkan bahwa faktor penentu upah minimum yang signifikan yaitu Indeks Harga Konsumen, Produk Domestik Regional Bruto, dan Tingkat Pekerjaan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Purhadiyanto (2018) yaitu “Analisis Faktor Penentu Kebijakan UMR di Indonesia Tahun 2006-2015”. Penelitian ini bertujuan guna melakukan analisis faktor apa saja yang memberi pengaruh ketika menentukan kebijakan upah minimum pada tahun 2006-2015. Metode yang digunakan yaitu data panel dengan regresi *Fixed Effect Method* (FEM) serta memakai data *time series* dari tahun 2006-2015 dan *cross section* sejumlah 33 provinsi Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini memperlihatkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kehidupan Hidup Layak (KHL), beserta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan pengaruh signifikan, sementara Inflasi memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap UMR di Indonesia.

Lebih lanjut, Taufan & Mafruhah (2022) meneliti mengenai “Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Produk Domestik Regional Bruto dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat Tahun 2009-2021”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Produk Domestik Regional Bruto, beserta Investasi di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji metode OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara teori *Keynes*, PDRB mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, UMK mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dalam teori upah efisiensi. Lalu, variabel Investasi menurut teori *Harrod Domar* juga memberi pengaruh atas penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya, Utami (2019) meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017”. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017. Penelitian menggunakan model regresi data panel. Penelitian menunjukkan bahwa Inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penentuan upah minimum di 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penentuan upah minimum di Provinsi Jawa Tengah.

LANDASAN TEORI

Teori Upah

Sukirno (2013:350) menjabarkan upah ialah imbal jasa individu terima akibat keterkaitan kerja dengan berwujud barang ataupun uang dengan perjanjian kerja, imbalan kerja beserta diberikan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri serta keluarganya. Di Indonesia sistem pengupahan umumnya dilandaskan atas tingkat fungsi upah yakni guna memberi jaminan atas kelayakan hidup untuk individu beserta keluarga, memberikan cerminan imbal jasa indivisu, beserta memberikan persediaan insentif guna peningkatan produktivitas kerja.

Teori Upah Minimum

UU No.13 Tahun 2003 menjabarkan sebagai standar terkecil untuk acuan bagi pelaku industri maupun pengusaha dalam pengupahan bagi pekerja pada wilayah. Di tiap daerah memiliki standar guna menetapkan upah minimum masing-masing. Hal

ini dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya, maka dari itu upah yang dimaksud disebut dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). UMP diterimakan setiap bulan dengan nilai terendah guna imbalan bagi pekerja dari penguasa untuk jasa atau kerja terlaksana serta dinilai ataupun dinyatakan dengan wujud uang yang ditentukan dengan dasar sebuah perjanjian kerja diantara karyawan dan pengusaha mencakup tunjangan, baik untuk karyawan ataupun keluarganya.

Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Rustiadi (2009) menjabarkan sebagai banyak produksi kotor dari sebuah wilayah, yaitu jumlah nilai tambah dari seluruh jasa beserta benda produksi pada negara ataupun wilayah dalam satu tahun periode. Badan Pusat Statistik (2022) menjabarkan PDRB ialah total nilai tambah bruto (*gross value added*) muncul dikeseluruhan sektor ekonomi sebuah wilayah. Data PDRB dipakai tidak hanya guna melakukan pengukuran besaran pengeluaran produksi, namun juga guna mengukur kesejahteraan masyarakat disebuah wilayah. Meningkatnya PDRB memberikan sebab pendapatan daerah berasal pada sektor pajak beserta restribusi naik. Maka, memberi dampak terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu daerah.

Teori Penanaman Modal Asing

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, adalah meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia. Penanaman modal dilaksanakan secara asing dengan memakai sepenuhnya modal asing maupun patungan dengan lokal. pekerja.

Teori Penanaman Modal Dalam Negeri

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing Dalam Negeri, adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan

usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan dengan menggunakan modal dalam negeri. Kegiatan ini berguna untuk membangun suatu usaha. Penanaman modal ini dilaksanakan tanam modal lokal yaitu warga Indonesia atau daerah pelaksana di Indonesia.

Teori Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Mankiw (2013:111) menjabarkan angkatan kerja (*labor force*) ialah total individu menganggur beserta bekerja, kemudian tingkat pengangguran (*unemployment rate*) yaitu presentase angka tidak bekerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ialah indikator ketenagakerjaan dengan penggambaran terkait kependudukan aktif berdasarkan ekonomi pada aktivitas keseharian yang berpedoman atas sebuah waktu pada masa kontrol. TPAK indikator guna melakukan analisa partisipasi angkatan kerja.

METODE PENELITIAN

Definisi Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini digunakan Indeks Harga Konsumen, Produk Domestik Regional Bruto, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebagai variabel independen dan Upah Minimum Provinsi sebagai variabel dependen.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini memakai metode regresi uji koreksi kesalahan atau *Error Correction Model* (ECM). Uji ECM merupakan salah satu metode analisis untuk mengetahui hubungan dimana suatu variabel dependen dapat dipengaruhi oleh variabel. ECM digunakan untuk menjelaskan perilaku jangka panjang dan jangka pendek dari suatu model. Walaupun terdapat hubungan jangka panjang antara kedua variabel, akan tetapi belum tentu terdapat keseimbangan pada kedua hubungan variabel. Uji ECM dibagi menjadi dua estimasi yaitu :

1. Model Jangka Panjang

Estimasi jangka panjang dilakukan untuk menganalisis estimasi jangka panjang tentang hubungan antara variabel dependen dan independen yang sangat penting. Adapun model jangka panjang yang digunakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1t} + \alpha_2 X_{2t} + \alpha_3 X_{3t} + \alpha_4 X_{4t} + \alpha_5 X_{5t} + \alpha_6 X_{6t} + u_t$$

dimana :

$$Y = \text{Upah Minimum Provinsi (Rp)}$$

$$\alpha_0 = \text{Konstanta}$$

$$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 \alpha_5 = \text{Koefisien Regresi}$$

X_1 = Indeks Harga Konsumen (IHK) (%)

X_2 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (juta Rp)

X_3 = Penanaman Modal Asing (juta Rp)

X_4 = Penanaman Modal Dalam Negeri (juta Rp)

X_5 = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)

u_t = nilai residual

2. Model Jangka Pendek

Estimasi jangka pendek memiliki tujuan untuk mengetahui penjelasan tentang hubungan antara variabel dependen dan independen. Model untuk estimasi jangka pendek dimungkinkan jika kointegrasi antar variabel ditentukan secara tepat. Ada beberapa contoh di mana hasil dari kondisi estimasi jangka panjang dan jangka pendek yang berbeda. Secara khusus, ketidakseimbangan dalam hubungan variabel terjadi dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, hubungan variabel mencapai keseimbangan.. Dari dua penjelasan tersebut, maka perbedaan perlu dikoreksi oleh ECM dengan suatu penyesuaian yang dikenal dengan sebutan *Error Correction Term* (ECT). Adapun model estimasi Upah Minimum Provinsi dalam jangka pendek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta X_{1t} + \beta_2 \Delta X_{2t} + \beta_3 \Delta X_{3t} + \beta_4 \Delta X_{4t} + \beta_5 \Delta X_{5t} + \beta_6 ECT + u_t$$

Y = Upah Minimum Provinsi (Rp)

β_0 = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5 \beta_6$ = Koefisien Regresi

X_1 = Indeks Harga Konsumen (IHK) (%)

X_2 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (juta Rp)

X_3 = Penanaman Modal Asing (juta Rp)

X_4 = Penanaman Modal Dalam Negeri (juta Rp)

X_5 = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK (%))

ECT = *Error Correction Term*

u_t = nilai residual

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Error Correction Model (ECM)

Metode ECM digunakan sebagai metode selanjutnya untuk analisis. Dalam penelitian ini menggunakan Metode ECM yang dipopulerkan oleh *Engle-Granger*. Langkah pertama yaitu melakukan analisis untuk mendapatkan hasil regresi jangka panjang yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Jangka Panjang

Tabel 1
Hasil Uji Regresi ECM Jangka Panjang

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	98535.71	462464.6	0.213066	0.8338
IHK	-704.0402	417.8362	-1.684967	0.1103
PDRB	0.004962	0.001579	3.143010	0.0059
PMA	0.045185	0.022536	2.005048	0.0611
PMDN	0.021688	0.004789	4.528379	0.0003
TPAK	3583.529	6636.216	0.539996	0.5962
R-squared	0.981454	Mean dependent var	876101.9	
Adjusted R-squared	0.975999	S.D. dependent var	513531.3	
S.E. of regression	79556.91	Akaike info criterion	25.62579	
Sum squared resid	1.08E+11	Schwarz criterion	25.92201	
Log likelihood	-288.6966	Hannan-Quinn criter.	25.70029	
F-statistic	179.9288	Durbin-Watson stat	1.485160	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data yang diolah menggunakan *Eviews 12*.

Persamaan dibawah ini merupakan hasil estimasi jangka panjang dalam penelitian:

$$Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1t} + \alpha_2 X_{2t} + \alpha_3 X_{3t} + \alpha_4 X_{4t} + \alpha_5 X_{5t} + u_t$$

$$Y = \text{UMP}$$

$$\alpha_0 = 98535.71$$

$$\alpha_1 = -704.0402$$

$$X_1 = \text{IHK}$$

$$\alpha_2 = 0.004962$$

$$X_2 = \text{PDRB}$$

$$\alpha_3 = -0.045185$$

$$X_3 = \text{PMA}$$

$$\alpha_4 = 0.021688$$

$$X_4 = \text{PMDN}$$

$$\alpha_5 = 3583.529$$

$$X_5 = \text{TPAK}$$

u_t = nilai residual

$$\text{UMP} = 98535.71 - 704.0402 \text{ IHK} + 0.004962 \text{ PDRB} - 0.045185 \text{ PMA} + 0.021688 \text{ PMDN} + 3583.529 \text{ TPAK} + u_t$$

Berdasarkan penjelasan variabel dari tabel hasil regresi jangka panjang adalah sebagai berikut :

1. Variabel Indeks Harga Konsumen mempunyai nilai koefisien sebesar -704.0402 yang berarti ketika Indeks Harga Konsumen naik 1 persen, maka Upah Minimum Provinsi akan turun sebesar 70.04 persen. Ditemukan t-statistik sebesar -1.684967 dengan nilai probabilitas sebesar 0.1103 yang dimana < daripada $\alpha = 0,10$ (10%). Hal tersebut berarti dalam jangka panjang, Indeks Harga Konsumen berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi.
2. Variabel Produk Domestik Regional Bruto mempunyai nilai koefisien sebesar 0.004962. Ditemukan t-statistik sebesar 3.143010 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0059 yang dimana > daripada $\alpha = 0,10$ (10%). Hal tersebut berarti dalam jangka panjang, Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi.

3. Variabel Penanaman Modal Asing mempunyai nilai koefisien sebesar 0.045185 Ditemukan t-statistik sebesar 2.005048 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0611 yang dimana $<$ daripada $\alpha = 0,10$ (10%). Hal tersebut berarti dalam jangka panjang, Penanaman Modal Asing berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi.
4. Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri mempunyai nilai koefisien sebesar 0.021688. Ditemukan t-statistik sebesar 4.528379 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0003 yang dimana $<$ daripada $\alpha = 10\%$. Hal tersebut berarti dalam jangka panjang, Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi.
5. Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan mempunyai nilai koefisien sebesar 3783.529 yang berarti ketika Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja naik 1 persen, maka Upah Minimum Provinsi akan naik sebesar 37.83 persen. Ditemukan t-statistik sebesar 0.539996 dengan nilai probabilitas sebesar 0.5962 yang dimana $<$ daripada $\alpha = 0,10$ (10%). Hal tersebut berarti dalam jangka panjang, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi.

2. Analisis Jangka Pendek

Tabel 2

Hasil Regresi ECM Jangka Pendek

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	46293.91	21062.33	2.197949	0.0441
D(IHK)	-55.65621	341.6284	-0.162914	0.8728
D(PDRB)	0.001458	0.001913	0.762264	0.4577
D(PMA)	-0.011630	0.026591	-0.437370	0.6681
D(PMDN)	0.025820	0.007161	3.605627	0.0026

D(TPAK)	1932.630	3795.216	0.509228	0.6180
ECT (-1)	-0.10294	0.209283	-3.871769	0.0009
R-squared	0.516541	Mean dependent var	74837.09	
Adjusted R-squared	0.323158	S.D. dependent var	73232.96	
S.E. of regression	60249.05	Akaike info criterion	25.10373	
Sum squared resid	5.44E+10	Schwarz criterion	25.45088	
Log likelihood	-269.1411	Hannan-Quinn criter.	25.18551	
F-statistic	2.671074	Durbin-Watson stat	2.655444	
Prob(F-statistic)	0.057426			

Sumber : Data yang diolah menggunakan *Eviews 12*.

Persamaan dibawah ini merupakan hasil estimasi jangka pendek dalam penelitian:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \beta_4 X_{4t} + \beta_5 X_{5t} + e_t$$

$$Y = \text{UMP}$$

$$\beta_0 = 46293.91$$

$$\beta_1 = -55.65621 \quad X_1 = \text{IHK}$$

$$\beta_2 = 0.001458 \quad X_2 = \text{PDRB}$$

$$\beta_3 = -0.011630 \quad X_3 = \text{PMA}$$

$$\beta_4 = 0.025820 \quad X_4 = \text{PMDN}$$

$$\beta_5 = 1932.630 \quad X_5 = \text{TPAK}$$

$$e = \text{error} \quad t = \text{time series}$$

$$\text{UMP} = 46293.91 - 55.65621\text{IHK} + 0.001458 \text{PDRB} - 0.0011630 \text{PMA} + 0.025820 \text{PMDN} + 1932.630 \text{TPAK} + e_t$$

Berdasarkan penjelasan variabel dari tabel hasil regresi jangka pendek adalah sebagai berikut :

Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri mempunyai nilai koefisien sebesar 0.025820. Ditemukan t-statistik sebesar 3.605627 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0026 yang dimana $<$ daripada $\alpha = 0,05$ (5%). Hal tersebut berarti dalam jangka pendek, Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi.

3. *Error Correction Test (ECT)*

Tabel 3

Hasil Uji ECT

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
ECT(-1)	-0.810294	0.209283	-3.871769	0.0009

Sumber : Data yang diolah menggunakan *Eviews 12*.

Pada hasil regresi jangka pendek, ditemukan nilai koefisien dari *error correction term* sebesar -0.810294 dengan probabilitas t-statistik sebesar 0.0009 yang berarti memenuhi syarat dimana nilai ECT harus negatif dan signifikan. Dengan demikian, model ECM yang digunakan sudah tepat.

Analisis Ekonomi

Analisis ekonomi terhadap hasil penelitian baik jangka panjang maupun jangka pendek diperlukan untuk menjelaskan fenomena dari setiap variabel apa saja yang mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta arti dari koefisien masing-masing variabel dan arah pengaruhnya.

1. Analisis Pengaruh Variabel Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada hasil uji ECM jangka panjang, Indeks Harga Konsumen (IHK) memiliki nilai probabilitas $0.1103 < \alpha = 0,10$ (10%), sehingga sesuai dengan hipotesis karena berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bersales & Lucagbo (2014) bahwa variabel Indeks Harga Konsumen (IHK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penentuan upah minimum di Filipina. Kemudian pada hasil uji ECM jangka pendek, IHK memiliki nilai probabilitas $0.8728 > \alpha = 0,05$ (5%), sehingga tidak sesuai dengan hipotesis karena tidak berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursakinah (2016) bahwa variabel Indeks Harga Konsumen (IHK) tidak berpengaruh terhadap penetapan upah minimum di Jabodetabek. Indeks Harga Konsumen sebagai tolak ukur inflasi sedang mengalami fluktuasi.

2. Analisis Pengaruh Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil analisis menunjukkan bahwa hasil uji ECM pada jangka panjang, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki nilai probabilitas $0.059 < \alpha = 0,10$ (10%), sehingga sesuai dengan hipotesis karena berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purhadiyanto (2018) bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap UMR di Provinsi Indonesia. Hal ini karena jika PDRB mengalami peningkatan, maka suatu daerah tersebut juga akan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam tingkat upah minimum.

Kemudian pada hasil uji ECM jangka pendek, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki nilai probabilitas $0.4577 > \alpha = 0,05$ (5%), sehingga tidak sesuai dengan hipotesis yaitu PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP). Hasil ini sesuai dengan penelitian oleh Nurtiyas (2016) yang menunjukkan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tersebut nilai Upah Minimum Propinsi. Hal ini dikarenakan dalam penelitian memiliki kasus yang berbeda dalam penelitian. Namun, begitu PDRB turun, ambang batas upah akan naik, dan sebaliknya.

3. Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada hasil uji ECM jangka panjang, Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki nilai probabilitas $0.0611 < \alpha = 0,10$ (10%), sehingga sesuai dengan hipotesis karena berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufan & Mafruhah (2022) yang menunjukkan bahwa variabel Investasi memiliki pengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat Tahun 2009-2021. Dengan meningkatnya investasi pada sektor tersebut, maka masyarakat akan terus meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga berdampak pula ke peningkatan pendapatan nasional termasuk Upah Minimum Provinsi (UMP).

Kemudian pada hasil uji ECM jangka pendek, Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki nilai probabilitas $0.6681 > \alpha = 0,05$ (5%), sehingga tidak sesuai dengan hipotesis karena tidak berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2018) dalam jangka waktu 2011-2014 yang menunjukkan bahwa investasi tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di 6 Kota/Kabupaten di Provinsi Banten dimana nilai probabilitasnya pada perhitungan regresi $0.4134 > \alpha = 5\%$ dan

pada perhitungan secara parsial, menghasilkan $-t_{\text{hitung}}$ yaitu $-0,832979 > -1,70562$ sebagai $-t_{\text{tabel}}$.

4. Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada hasil uji ECM jangka panjang, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki nilai probabilitas $0.0003 < \alpha = 0,10$ (10%). Kemudian pada hasil uji ECM jangka pendek, PMDN memiliki nilai probabilitas $0.0026 < \alpha = 0,05$ (5%), sehingga sesuai dengan hipotesis karena berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Melvin (2018) yang menunjukkan bahwa Investasi memiliki pengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur. Dengan meningkatnya investasi pada sektor tersebut, maka masyarakat akan terus meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga berdampak pula ke peningkatan pendapatan nasional termasuk Upah Minimum Provinsi (UMP).

5. Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada hasil uji ECM jangka panjang, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki nilai probabilitas $0.5962 < \alpha = 0,10$ (10%), sehingga sesuai dengan hipotesis karena berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP). Hasil ini sesuai dengan penelitian oleh Utami (2019) yang menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh signifikan terhadap nilai UMR. Dalam hal ini, tingkat upah yang telah ditetapkan dapat meningkat oleh adanya penyesuaian diri oleh peningkatan penawaran tenaga kerja.

Kemudian pada hasil uji ECM jangka pendek, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki nilai probabilitas $0.552 > \alpha = 0,05$ (5%), sehingga tidak sesuai hipotesis karena TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP). Hasil ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Damanik & Zalukhu (2021) yang menunjukkan bahwa TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kota PematangSiantar.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis statistik, variabel Indeks Harga Konsumen (IHK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada uji ECM jangka panjang berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP).
2. Berdasarkan hasil analisis statistik, variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada uji ECM jangka pendek berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP). Sedangkan pada variabel Indeks Harga Konsumen (IHK) , Penanaman Modal Asing (PMA), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP).

2. Implikasi

Terdapat beberapa implikasi yang diperoleh dari hasil Analisis Indeks Harga Konsumen, Produk Domestik Regional Bruto, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2000-2022, antara lain :

1. Pengaruh Indeks Harga Konsumen terhadap Upah Minimum Provinsi yaitu dapat meningkatkan daya beli. Hal ini karena disaat UMP meningkat, maka pekerja akan memiliki lebih banyak uang untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa dapat meningkat. Ini dapat membantu memacu pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi serta mendukung pertumbuhan bisnis lokal.
2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Upah Minimum Provinsi yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Hal ini karena Ketika

PDRB mengalami kenaikan, maka menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik di suatu wilayah, sehingga dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan dapat memicu peningkatan pendapatan secara keseluruhan.

3. Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Upah Minimum Provinsi yaitu dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Hal ini karena investasi asing sering membawa teknologi, manajemen, dan praktek terbaik dari luar negeri ke suatu wilayah. Dari hal tersebut dapat menimbulkan dampak bagi produktivitas tenaga kerja lokal menjadi lebih produktif, sehingga perusahaan mungkin akan bersedia untuk membayar upah yang lebih tinggi untuk mempertahankan pekerja yang berkualitas.
4. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Upah Minimum Provinsi yaitu dapat mendorong peningkatan standar hidup. Hal ini karena investasi dalam negeri memungkinkan masyarakat setempat untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang lebih baik. Pemerintah daerah Provinsi dapat merespons hal tersebut dengan menaikkan upah minimum untuk memastikan bahwa pekerja memiliki akses yang lebih baik terhadap standar hidup yang lebih tinggi.
5. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Upah Minimum Provinsi yaitu dapat mendorong permintaan tenaga kerja. Hal ini berdampak pada adanya persaingan di pasar tenaga kerja, sehingga perusahaan dapat menawarkan upah yang lebih tinggi agar dapat menarik minat pekerja yang berkinerja tinggi dan pasar tenaga kerja menjadi lebih kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, & Zalukhu. (2021). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penetapan Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(1), 38–51. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i1.119>.
- Bersales, & Lucagbo (2014). Determinants of Regional Minimum Wages in the Philippines. *The Philippine Statistician*, 63(2), 71–85.
- Hermawan, A. (2018). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Inflasi Dan Ipm Terhadap Upah Minimum Kabupaten Di Karesidenan Pati Tahun 2010 – 2015. -, 1–13.
- Husada, A. P. & Yuhan, R. J. (2022). Direct dan Indirect Effect: Determinan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Bandung Conference Studies : Economics Studies* 22(2), 1–8. <https://doi.org/10.21002/jepi.2022.06>.
- Taufan & Mafruhah (2022). Direct dan Indirect Effect: Determinan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 98–116. <https://doi.org/10.29313/bceses.v2i2.3974>.
- Kertiasih, L. (2017). *19999-29852-1-Sm*. 9(1), 148–157.
- Melvin, D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Timur (1998-2017).1-86. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16133/1531322>
- Prabowo, A. (2018). Pengaruh Investasi, Upah Minimum Regional, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2010-2014. 1-118. <http://eprints.untirta.ac.id/1908>.
- Mankiw, N. G. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nursakinah, E. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum di Jabodetabek Tahun 2007-2016*. 1–23.
- Nurtiyas, F. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Propinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1(1), 1–107.

- Rahmawati, I. D. (2013). Pengaruh Investasi Dan Tingkat Upah Terhadap Kesempatan Kerja Di Jawa Timur. *E-Journal Unesa*, 1(3), 1–23. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/3582>.
- Sukirno, Sadono. (2013.). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Purhadiyanto, Putri Wulandari. (2018). *Analisis Faktor Penentu Kebijakan UMR di Indonesia Tahun 2006-2015*, 1-15.
- Widarjono, Agus. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Ekonisia.